

## **BAB V**

### **PENDANAAN**

---

#### **5.1. Struktur Pendanaan**

Struktur pendanaan UMKM yang merupakan perbandingan antara penggunaan hutang dan modal sendiri. Sebelum membahas struktur pendanaan tersebut, terlebih dahulu akan dipaparkan berapa rata-rata kebutuhan dana sekali produksi. Semakin besar kebutuhan dana tersebut, semakin kecil potensi UMKM hanya menggunakan modal sendiri saja, sehingga membutuhkan tambahan dana berupa hutang, baik yang bersumber dari perbankan maupun non perbankan. Tabel 5.1 memperlihatkan bahwa rata-rata kebutuhan sekali produksi antar jenis klaster sangat bervariasi. Paling tinggi adalah usaha susu mencapai Rp 8,142,857,- kemudian disusul usaha batik, bordir, konveksi sebesar Rp 5,004,815,-. Ada beberapa jenis usaha relatif kecil kebutuhan dananya bahkan ada yang menyatakan tidak membutuhkan dana sama sekali seperti usaha kelinci, kerajinan, pupuk organik dan sapi.

Menilik dari hasil tersebut besaran kebutuhan dana kegiatan produksi tersebut tidak bisa dilepaskan dari skala usaha, dalam hal ini diukur dengan nilai omzetnya. Misalnya untuk susu dan usaha batik, bordir, konveksi rata-rata kebutuhan dana untuk sekali produksi tinggi karena omzetnya juga tinggi. Sebaliknya untuk usaha kelinci dan pupuk organik, rata-rata kebutuhan dananya kecil karena omzetnya sangat kecil sekali masing-masing Rp 5,160,000,- dan Rp 11,316,000 per-tahun. Jika kebutuhan dana masih relatif kecil maka sumber pendanaan masih dapat menggunakan semuanya dari modal sendiri atau kalau tidak memadai belum perlu mengajukan kredit komersial perbankan, mungkin akan lebih baik memanfaatkan skema kredit program seperti KUR.

**Tabel 5.1 Kebutuhan Dana Sekali Produksi Industri Inti dalam Klaster Per Bulan (dalam ribuan)**

No	Klaster	Kebutuhan Dana Sekali Produksi			
		Mean	Min	Max	St.Dev
1	Batik, Bordir, dan Konveksi	5,004	40	22,500,	7,106
2	Kelinci	174	-	60	263
3	Kerajinan	1,303	-	10,000	2,053
4	Makanan Olahan	4,414	50	30,000	7,294
5	Makanan Olahan Ikan	3,690	100	20,000	5,938
6	Pupuk Organik	33	-	100	57
7	Sapi	1,392	-	8,500	1,550
8	Susu	8,142	1,050	24,000	9,076

Sumber : Data Primer, 2015

Tabel 5.2 memperlihatkan tidak semua pengusaha sudah menggunakan hutang untuk sumber pendanaan. Dari 212 pengusaha, baru 76 diantaranya atau 35,85% yang memiliki hutang. Pengusaha yang tidak menggunakan hutang adalah pengusaha di klaster Kelinci dan Pupuk Organik. Hal ini kemungkinan kedua jenis klaster tersebut kebutuhan dananya relatif kecil sehingga tidak memerlukan hutang.

**Tabel 5.2 Jumlah Pengusaha Memiliki Hutang**

No	Klaster	Memiliki Hutang	Total	%
1	Batik, Bordir, dan Konveksi	12	27	44.44
2	Kelinci	0	8	0.0
3	Kerajinan	8	38	21.0
4	Makanan Olahan	27	68	39.7
5	Makanan Olahan Ikan	5	11	45.4
6	Pupuk Organik	0	5	0.00
7	Sapi	18	48	37.50
8	Susu	6	7	85.71
<b>TOTAL</b>		<b>76</b>	<b>212</b>	<b>35.85</b>

Sumber : Data Primer, 2015

Rata-rata sekali hutang sangat bervariasi. Misalnya untuk usaha batik, bordir dan konveksi, adalah sebesar Rp 55,416,667 sementara untuk makanan olahan hanya Rp16,028.000. Selain itu besaran hutang antar pengusaha dalam suatu klaster juga bervariasi. Misalnya untuk usaha batik, bordir dan konveksi paling sedikit sebesar Rp 5.000.000 dan paling banyak mencapai Rp200.000.000,-

**Tabel 5.3 Rata-Rata Hutang**

No	Klaster	Jumlah Hutang yang Diperoleh			
		Mean (000)	Min (000)	Max (000)	St. Dev(000)
1	Batik, Bordir, dan Konveksi	55,416	5,000	200,000	72,589
2	Kelinci	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Kerajinan	47,071	1,000	300,000	111,596
4	Makanan Olahan	16,028	200	50,000	17,851
5	Makanan Olahan Ikan	68,000	2,000	200,000	90,199
6	Pupuk Organik	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
7	Sapi	34,352	2,000	120,000	29,321
8	Susu	42,166	1,000	200,000	77,764

Sumber : Data Primer, 2015

Meskipun sudah menggunakan hutang sebagai tambahan modal, tetapi tambahan modal tersebut masih relatif kecil. Mayoritas struktur pendanaan UMKM di Salatiga masih dominan menggunakan modal sendiri. Sebagian besar pengusaha, memiliki proporsi hutang terhadap keseluruhan modal yang dibutuhkan kurang dari 20%. Dari hasil penelitian juga terungkap bahwa banyak pengusaha beranggapan proporsi hutang tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan. Untuk klaster batik, bordir dan konveksi, 83,33% pengusaha yang berhutang menyatakan jumlah hutang diperolehnya selama ini sudah sesuai dengan yang dibutuhkan.

**Tabel 5.4 Proporsi Hutang Terhadap Modal Usahanya**

No	Klaster	Proporsi Pendanaan dari Hutang					Total
		≤ 20 %	21% - 40 %	41% - 60%	61% - 80%	≥ 81%	
1	Batik, Bordir, dan Konveksi	23	2	1	0	1	27
	%	85.19	7.41	3.70	0.00	3.70	100
2	Kerajinan	33	0	3	1	1	38
	%	86.84	0	7.89	2.63	2.63	100
3	Makanan Olahan	51	3	8	4	2	68
	%	75	4.41	11.76	5.88	2.94	100
4	Makanan Olahan Ikan	8	2	1	0	0	11
	%	72.73	18.18	9.09	0.00	0.00	100
5	Sapi	26	5	8	6	3	48
	%	54.17	10.42	16.67	12.50	6.25	100
6	Susu	3	2	1	0	1	7
	%	42.86	28.57	14.29	0	14.29	100

Sumber : Data Primer, 2015

## 5.2. Preferensi Sumber Pendanaan

Sumber hutang yang paling sering digunakan oleh para pengusaha selama ini baik untuk kepentingan modal kerja dan kegiatan investasi adalah bank umum, kemudian disusul BPR dan koperasi. Banyaknya pengusaha yang sering menggunakan perbankan sebagai sumber pendanaan mengindikasikan bahwa banyak pengusaha UMKM di Salatiga membutuhkan dana relatif besar dan sudah *bankable*.

**Tabel 5.5 Urutan Sumber Pendanaan Berdasarkan Keseringannya  
(Frekuensinya) Untuk Kepentingan Usaha**

Urutan	Sumber Pendanaan									
	Bank Umum	%	Bank BPR	%	Koperasi	%	Saudara	%	Temam / Tetangga	%
1	47	68.12	3	7.14	12	25.00	14	41.18	9	27.27
2	2	2.90	15	35.71	5	10.42	9	26.47	12	36.36
3	1	1.45	-	-	28	58.33	4	11.76	2	6.06
4	17	24.64	2	4.76	1	2.08	7	20.59	5	15.15
5	2	2.90	22	52.38	2	4.17	-	-	5	15.15
<b>Total</b>	<b>69</b>	<b>100</b>	<b>42</b>	<b>100</b>	<b>48</b>	<b>100</b>	<b>34</b>	<b>100</b>	<b>33</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer, 2015

Tabel 5.6 menunjukkan sejumlah pertimbangan yang dikemukakan oleh pengusaha mengapa sering menggunakan sumber pendanaan tertentu. Sebanyak 32,39% dari 71 pengusaha menyatakan faktor kenyamanan menjadi pertimbangan utama memilih sumber pendanaan, kemudian disusul besaran bunga pinjaman dan proses pengajuan yang mudah dan cepat.

**Tabel 5.6 Pertimbangan Memilih Sumber Pendanaan Hutang**

No	Pertimbangan	Jumlah	%
1	Akses & Cara Pembayaran Lebih Mudah	4	5.63
2	Bunga Pinjaman / Kredit Ringan	16	22.54
3	Jumlah Pinjaman	7	9.86
4	Kenyamanan	23	32.39
5	Kepercayaan	5	7.04
6	Musyawarah Kelompok / Asosiasi	2	2.82
7	Proses Pengajuan Mudah dan Cepat	14	19.72
<b>Total</b>		<b>71</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer, 2015

Bagaimana preferensi pengusaha terhadap jenis sumber pendanaan hutang? Tabel 5.7 menunjukkan preferensi sumber pendanaan hutang baik yang sudah berhutang maupun yang akan berhutang. Sebanyak 53,91% dari 115 pengusaha menempatkan preferensi Bank Umum sebagai sumber utama hutang, kemudian 13,91% pengusaha menempatkan Bank umum sebagai urutan kedua dan seterusnya. Secara keseluruhan dapat dibaca urutan preferensi sumber hutang secara berturut-turut adalah (1) Bank umum; (2) BPR; (3) Koperasi; (4) Saudara dan (5) Tetangga. Hal dapat diartikan sudah cukup banyak pengusaha yang berorientasi pada sektor perbankan sebagai sumber alternatif pendanaan hutang.

Tabel 5.7 Preferensi sumber Pendanaan

Urutan Preferensi	Sumber Pendanaan *)									
	Bank Umum	%	Bank BPR	%	Koperasi	%	Saudara	%	Teman / Tetangga	%
1	62	53.91	3	3.30	18	19.35	27	34.18	10	13.16
2	16	13.91	30	32.97	10	10.75	12	15.19	24	31.58
3	9	7.83	19	20.88	51	54.84	7	8.8	1	1.32
4	23	20.00	12	13.19	6	6.45	28	35.44	10	13.16
5	5	4.35	27	29.67	8	8.60	5	6.33	31	40.79
Total	115	100	91	100	93	100	79	100	76	100

Sumber : Data Primer, 2015

Keterangan \*) Responden dimungkinkan tidak mengisi semua urutan preferensi

Meskipun banyak yang menempatkan perbankan sebagai prioritas sumber pendanaan hutang, pertanyaan adalah apakah pengusaha merasa selama ini tidak mengalami kesulitan akses pendanaan perbankan tersebut? Dari hasil penelitian terhadap 109 pengusaha UMKM pernah mengajukan kredit perbankan seperti yang tersaji pada Tabel 5.8 dapat diketahui bahwa sebanyak 37,61% pengusaha menyatakan pernah mengalami kesulitan mendapatkan kredit perbankan dikarenakan omzet penjualan tidak menentu dan tidak adanya agunan.

**Tabel 5.8 Kesulitan Mendapatkan Pendanaan Perbankan**

No	Klaster	Kondisi				Total
		Kesulitan	%	Tidak Kesulitan	%	
1	Batik, Bordir, dan Konveksi	5	29.41	12	70.59	17
2	Kelinci	4	100	0	-	4
3	Kerajinan	7	41.18	10	58.82	17
4	Makanan Olahan	14	36.84	24	63.16	38
5	Makanan Olahan Ikan	2	40	3	60	5
6	Pupuk Organik	0	0	0	0	0%
7	Sapi	8	34.78	15	65.22	23
8	Susu	1	20	4	80	5
TOTAL		41	37.61	68	62.39	109

Sumber : Data Primer, 2015

### 5.3. Program Bantuan Pemerintah

Terdapat beberapa program bantuan yang diberikan dinas terkait di Kota Salatiga dalam rangka pengembangan UMKM berupa bantuan alat dan pelatihan yang dapat dikategorikan sebagai alternatif pendanaan UMKM

#### Bidang Perindustrian pada Disperindagkop dan UMKM

Pada tahun 2014 terdapat 22 bantuan alat, adapun sumber anggaran berasal dari APBD Kota Salatiga. Jumlah anggaran pada tahun 2014 sebesar dua ratus enam belas juta rupiah berupa bantuan alat. Keputusan Walikota Salatiga No 800/114/SK/2014



dalam pemberian bantuan alat dan pelatihan berdasarkan pada NPHD walikota atau Surat Keputusan Walikota Salatiga No 900/127/sk/2014, Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Salatiga No 530/008/sk/2014. Dalam penentuan atau kriteria calon penerima bantuan berdasarkan pada petunjuk pelaksanaan dari Indag. Untuk proses pemberian bantuan dilakukan berdasarkan proposal yang dibuat oleh masyarakat dengan diketahui oleh pihak kelurahan dan kecamatan kemudian diverifikasi oleh bidang Perindustrian pada Disperindagkop dan UMKM selanjutnya proposal yang lolos verifikasi akan diproses di dinas ini. Setelah bantuan mereka turun barulah pada saat pengambilan dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk. Sedangkan untuk Mekanisme pemberian bantuan pada Bidang ini sesuai dengan Standar Operasioal Prosedur yang terdapat pada Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Salatiga No 530/008/sk/2014 BAB VII Pasal 8 yaitu:

**Mekanisme bantuan/peralatan**

1. Calon penerima bantuan mesin/ peralatan mengajukan proposal sesuai ketentuan;
2. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Salatiga melakukan verifikasi dan survey lapangan atas kelayakan usaha calon penerima bantuan;
3. Atas hasil verifikasi dan survey lapangan tersebut, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Salatiga dibahas tim untuk menerima atau menolak pengajuan pemberian mesin/peralatan/bahan baku;
4. Hasil verifikasi, survey, pembahasan tersebut sebagai dasar penerbitan pengesahan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Salatiga;
5. Daftar calon penerima mesin/peralatan dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM
6. Bantuan mesin/peralatan/bahan baku dilengkapi Berita Acara Serah Terima Peralatan;

7. Penyerahan Mesin/Peralatan/bahan baku dan penanda-tanganan Berita Acara dilaksanakan dilokasi bantuan peralatan;

Setahun setelah bantuan turun barulah ada monitoring. Monitoring diadakan secara *sampling* tidak keseluruhan. Kendala dalam pengucuran bantuan ini adalah *double* bantuan dari dinas lain, namun persentasi kemungkinan *double* hanya sekitar 5-10%.

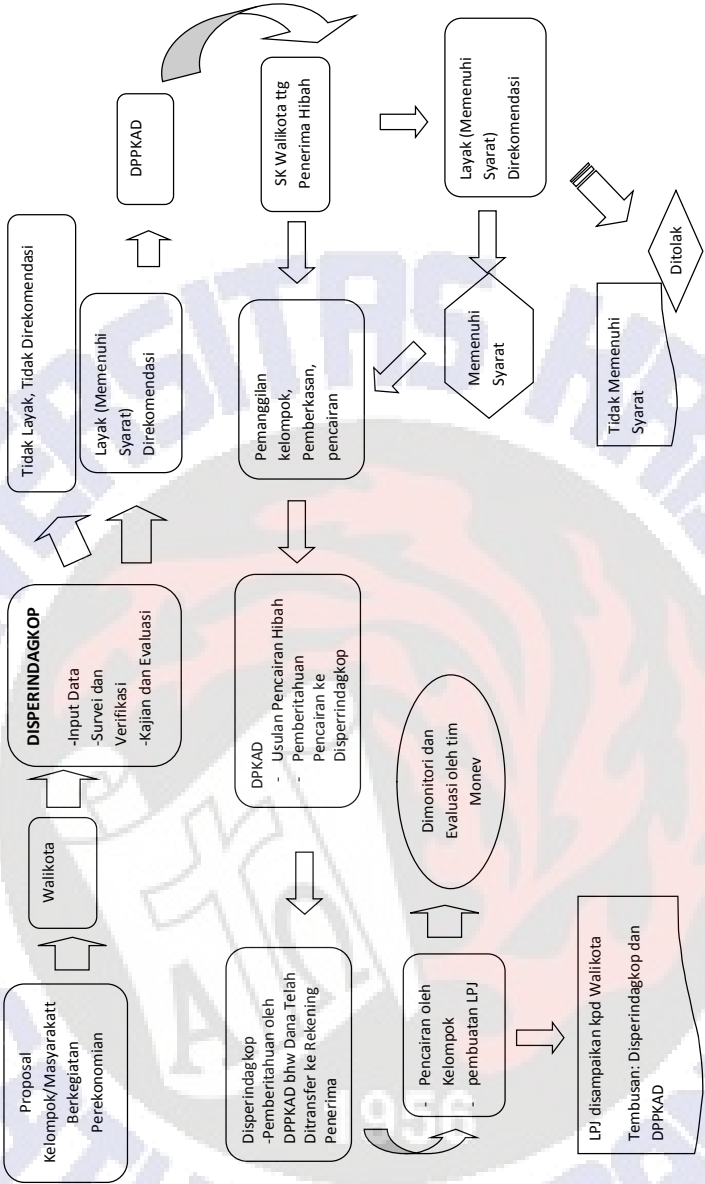
#### **Bidang Koperasi pada Disperindagkop dan UMKM**

Program-program bantuan yang diberikan dinas dalam pengembangan sumber pendapatan alternatif pendanaan berupa bantuan modal, alat dan pelatihan. Bantuan modal terdapat dua jenis yaitu Dana Hibah dan dana Pinjaman.

Dana Hibah berasal dari APBD kota dengan mengacu pada Peraturan Walikota. Pada tahun 2014 terdapat 401 pengajuan bantuan dana hibah namun, hanya sekitar 263 saja yang dapat dicairkan sekitar Rp. 1.546.500.000 adapun sumber anggaran berasal dari APBD Kota Salatiga. Yang berhak mendapatkan hibah ialah mereka yang sudah membentuk kelompok ataupun koperasi, memiliki kegiatan usaha barulah bisa mengajukan bantuan hibah melalui proposal.

Dana pinjaman yang diberikan dinas ini berasal dari Badan Layanan Umum dana Bergulir dengan syarat pinjaman ini diberikan pada usaha kelompok, perseorangan, ataupun koperasi berdasarkan peraturan Peraturan Walikota. Sedangkan untuk jumlah bantuan Pinjaman pada tahun 2014 sebanyak 44 pinjaman kelompok dengan jumlah sebesar Rp 1.576.000.000.

Pada Bidang Koperasi pada Disperindagkop dan UMKM pemberian bantuan berupa alat dan pelatihan tidak sebesar pemberian bantuan modal berupa dana. Pada saat pemberian bantuan dinas ini menerapkan proses sesuai dengan mekanisme yang sudah tertulis dalam perwali namun sudah divisualisasikan dalam bentuk skema sebagai berikut:



Gambar 5.1 Skema Pemberian Bantuan

Evaluasi bantuan yang dilakukan oleh dinas ini berupa penarikan laporan pemanfaatan setiap tahunnya, berupa Laporan Keuangan ataupun kwitansi untuk pinjaman dan hibah. Jika Pinjaman dibuktikan dengan Kwitansi sedangkan untuk pembelanjaan sektor riil dibuktikan dengan laporan keuangan dan nota.

Kendala yang ditemukan oleh dinas pada saat pemberian bantuan ialah kurangnya tenaga untuk mengevaluasi bantuan, sehingga dalam evaluasi tidak dilakukan secara detail. Penerima bantuan tidak membuat LPJ sehingga pada saat pemeriksaan BPK dinas yang harus mengecek ulang.

### **Bidang UMKM pada Disperindagkop dan UMKM**

Program-program bantuan yang diberikan dinas dalam pengembangan sumber pendapatan alternatif pendanaan berupa bantuan modal, alat dan pelatihan.

Dana Hibah berasal dari APBD kota dan Dana bagi Hasil Cukai dengan mengacu pada Peraturan Walikota. Pada tahun 2013 terdapat 180 UMKM yang menerima fasilitas produksi. Adapun sumber anggaran berasal dari Dana bagi hasil Cukai sebesar Rp.100.800.000 Berdasarkan peraturan menteri keuangan SK 316 tahun 1994 tentang pinjaman koperasi dan UMKM dinas ini juga memberikan bantuan dana pinjaman yang disebut dengan kredit usaha rakyat yang berasal dari 1-5% laba BUMN. Yang berhak mendapatkan bantuan ini adalah UMKM Binaan Bidang UMKM pada Disperindagkop dan UMKM Kota Salatiga serta UMKM yang pernah mendapatkan Bantuan.

Dalam Pemberian Bantuan alat dan pelatihan dilakukan berdasarkan pada NPHD walikota atau Surat Keputusan Walikota Salatiga No 900/127/sk/2014 dan Undang-undang mengenai Usaha Kecil No 20 tahun 2008 serta peraturan Walikota Salatiga nomor 43 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Mekanisme yang digunakan selain sesuai dengan peraturan walikota juga sesuai dengan standar operasional dari bidang terkait

Pada saat pemberian bantuan dinas ini menerapkan proses sesuai dengan mekanisme yang sudah tertulis dalam Perwali Kota Salatiga dan dengan mengisi beberapa surat kelengkapan administrasi yang disyaratkan oleh dinas yang sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Monitoring bantuan yang dilakukan oleh dinas ini setiap tiga bulan sekali dengan mengisi formulir dan meninjau perkembangan dari sisi fungsi usaha, asset usaha, omset usaha, kapasitas produksi dan jenis usaha.

Kendala yang ditemukan oleh dinas ini pada saat pemberian bantuan ialah menemui beberapa UMKM yang mendapatkan bantuan *double* sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut Dinas menerapkan surat pernyataan. Sampai saat ini petugas masih menemui kendala kredit macet dari pemberian pinjaman, solusinya saat ini dilakukan penagihan dan masih berjalan.

#### **Bidang Ketahanan Pangan Pada Bapermas**

Program-program bantuan yang diberikan dinas dalam pengembangan sumber pendapatan alternatif pendanaan ditahun ini berupa pemberian pelatihan pemberian produk pangan dalam pengolahan diversifikasi pangan.

Dana yang digunakan untuk pelaksanaan pelatihan bersumber pada APBD kota dengan mengacu pada Peraturan Walikota dan Standar Pelayanan Minimal dari kementerian pertanian. Yang berhak mendapatkan ialah kelompok wanita tani dan pengolah *snack*. Mekanisme yang digunakan dalam pemberian pelatihan bersifat fleksibel selama masih ada dalam aturan dan undang-undang yang berlaku. Untuk evaluasi kegiatan dilakukan monitoring evaluasi setiap tahunnya. Kendala yang ditemukan selama ini adalah karakter penerima bantuan yang masih bersifat acuh setelah adanya pelatihan, sehingga harus terus-menerus untuk membimbingnya.

#### **Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan pada DISTANAK**

Program-program bantuan yang diberikan dinas dalam pengembangan sumber pendapatan alternatif pendanaan berupa bantuan bibit, alat, dan pelatihan. Dana Hibah berasal dari APBD kota dengan mengacu pada Peraturan Walikota. Pada tahun 2014 dalam pemberian pelatihan dilaksanakan melalui program

Peningkatan Produksi Peternakan/ perkebunan dengan 7 kegiatan antara lain:

- SLPHTP padi pada 3 wilayah yaitu kelurahan Tingkir Lor, Kauman Kidul dan Kelurahan Pulutan, kegiatan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/ Penyuluhan. Bentuk realisasi kegiatan dilakukan sepuluh kali pertemuan semenjak tanam hingga panen dengan peserta 25 orang per pertemuan
- SLPHTP Pisang di wilayah Randu Acir dengan bentuk kegiatan dilakukan sepuluh kali pertemuan semenjak tanam hingga panen dengan peserta 25 orang per pertemuan yang terbagi pada.
- Sosialisasi Pengembangan Tyto Alba pada 4 kecamatan
- Pemberdayaan P3A di 2 Lokasi
- Gerakan-gerakan pengendalian hama dan penyakit
- Pemberian Pestisida Tikus Wereng dan lain-lain

Dana yang digunakan dalam pelaksanaan program pelatihan ini ditahun 2014 bersumber dari APBD sebesar Rp 200.000.000. Aturan beserta mekanisme yang digunakan dalam pemberian bantuan ini mengacu pada Peraturan Walikota Salatiga nomor 43 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan mekanisme bantuan diberikan kepada kelompok tani.

Kendala yang ditemukan oleh dinas ini pada saat pemberian bantuan ialah berkurangnya antusias kelompok tani setelah menerima bantuan. Sehingga terdapat kendala dalam pemeliharaan tanaman yang sudah ditanam.

#### **Bidang Perikanan pada DISTANAK**

Program-program bantuan yang diberikan dinas dalam pengembangan sumber pendapatan alternatif pendanaan berupa bantuan kolam untuk pembuatan kolam pembudidayaan ikan, kolam budidaya lahan marginal dan bantuan penanganan penanggulangan penyakit ikan. Adapun sumber anggaran berasal dari DAK dan APBD kota Salatiga. Penggunaan dana yang

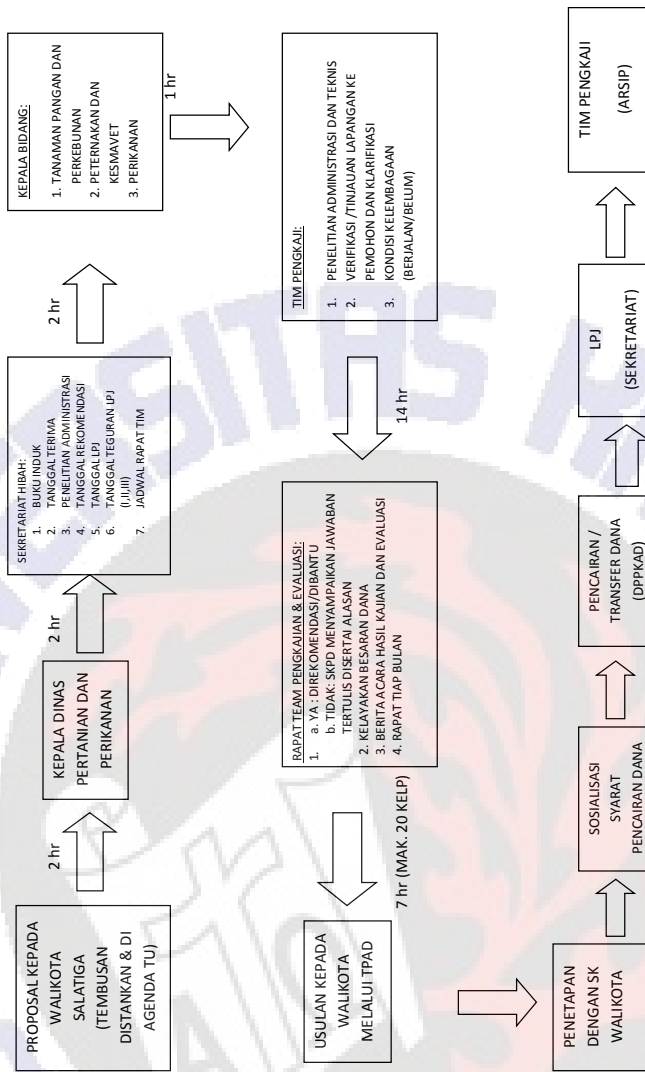


bersumber APBD adalah untuk bantuan yang bersifat operasional dan program bantuan penggunaan dana yang bersumber dari DAK Perikanan dan Kelautan ialah untuk pembangunan infrastruktur.

Pembantuan di bidang perikanan diberikan kepada kelompok, kelompok yang dimaksud oleh Bidang ini ada dua macam yaitu, kelompok pembudidaya Ikan dan kelompok pengolahan & pemasaran. Dengan kriteria:

- Kelompok tersebut aktif
- Sudah ada minimal satu tahun
- Keseriusan kelompok dalam menjalankan usahanya

Sebelum memberikan bantuan, dinas ini melakukan kajian terhadap kelompok yang telah mengajukan proposal. Setelah dikaji namun ternyata tidak sesuai kriteria dinas, kelompok tersebut diberikan stimulan untuk melihat keseriusan usaha terlebih dahulu. Dalam pemberian bantuan Bidang Perikanan pada DISTANAK sesuai dengan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Atau Hibah dan Peraturan Walikota Salatiga nomor 43 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Alur serta mekanisme pemberian Bantuan sosial dan hibah sesuai dengan SOP dinas terkait sebagai berikut:



Gambar 5.2 Alur serta mekanisme pemberian Bantuan sosial dan hibah



Evaluasi bantuan yang dilakukan oleh dinas ini berupa evaluasi fungsional kelompok dengan melihat dana dan bantuan yang diberikan apakah berkembang atau hanya mati ditengah jalan saja.

Kendala yang ditemukan oleh Bidang Perikanan pada DISTANAK adalah kemajuan dan fungsi dari kelompok hal dilakukan ialah merangkul dan membina secara intens untuk melihat perkembangan kemajuan dan fungsi dari kelompok.

#### **Bidang Peternakan pada DISTANAK**

Program-program bantuan yang diberikan dinas dalam pengembangan sumber pendapatan alternatif pendanaan berupa bantuan pengadaan sarana peternakan yaitu Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan ternak dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna dengan total anggaran Rp. 250.000.000 dan berasal dari APBD Kota Salatiga

Sebelum memberikan bantuan, dinas ini melakukan kajian terhadap kelompok yang telah mengajukan proposal. Setelah dikaji namun ternyata tidak sesuai kriteria dinas, kelompok tersebut diberikan stimulant untuk melihat keseriusan usaha terlebih dahulu. Dalam pemberian bantuan Bidang Peternakan pada DISTANAK sesuai dengan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Atau Hibah dan Peraturan Walikota Salatiga nomor 43 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ketika dilihat dari sisi UMKM berdasarkan hasil penelitian lapangan mengenai skema kredit program pemerintah untuk pendanaan UMKM seperti dana bergulir, program KUR yang tersaji pada Tabel 5.9, nampak bahwa 42,45% dari 212 pengusaha UMKM pernah menerima bantuan pendanaan dari pemerintah dalam bentuk modal tunai maupun kredit lunak. Adapun sumber informasi adanya bantuan pemerintah, sebagian besar pengusaha (73,75%) menyatakan berasal dari SKPD. Hal ini kemungkinan SKPD lebih banyak proaktif mendatangi pengusaha untuk menawarkan bantuan pendanaan.

**Tabel 5.9 Bantuan Pemerintah**

Kondisi	Jumlah	%
<b>Panel A. Pernah Memperoleh Bantuan Pemerintah</b>		
Ya	90	42.45
Tidak	122	57.55
<b>TOTAL</b>	<b>212</b>	<b>100</b>
<b>Panel B. Bentuk Bantuan Pemerintah</b>		
Bantuan Bahan Baku & Bibit (Input)	12	12.90
Bantuan Modal Tunai	34	36.56
Bantuan Peralatan	34	36.56
Pinjaman / Kredit Lunak	13	13.98
<b>TOTAL</b>	<b>93</b>	<b>100%</b>
<b>Panel C. Sumber Informasi</b>		
Asosiasi / Kelompok / Paguyuban	14	17.50
Instansi Pemerintah / SKPD / Perangkat Daerah	59	73.75
Media Elektronik (Internet / TV)	1	1.25
Teman / Saudara / Tetangga	6	7.50
<b>TOTAL</b>	<b>80</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer, 2015

Bagaimana dengan yang belum pernah memperoleh bantuan dari pemerintah? Berdasarkan Tabel 5.10 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yang belum memperoleh skema kredit program atau bantuan pemerintah menyatakan tidak tahu kalau ada bantuan pendanaan melalui skema kredit program dari pemerintah. Berikutnya dikarenakan sudah pernah mengajukan bantuan tetapi tidak berhasil.

**Tabel 5.10 Alasan Tidak Memperoleh Bantuan Pemerintah**

No.	Alasan	Jumlah	%
1	Tidak Tahu	77	68.75
2	Pernah Mengajukan Namun Tidak Mendapat Bantuan	17	15.18
3	Tidak Minat	8	7.14
4	Pemerintah Tidak Memberikan Kemudahan (Prosedur & Kepastian)	5	4.46
5	Pernah di Data Namun Tidak Ada Tindak Lanjut	2	1.79
6	Dalam Proses Mengajukan Proposal	1	0.89
7	Ingin Memberikan Kesempatan pada pengusaha lain	1	0.89
8	Skala Usaha Masih Kecil	1	0.89
<b>Total</b>		<b>112</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer, 2015

#### 5.4. Perkembangan Hutang dan Perkembangan Usaha

Perkembangan jumlah modal dapat digunakan indikator perkembangan suatu usaha, semakin besar hutang semakin besar peluang usahanya berkembang. Hutang merupakan salah satu sumber modal sehingga diharapkan suatu usaha yang hutangnya semakin besar, usahanya juga semakin berkembang. Dari hasil survey lapangan menunjukkan bahwa hanya 31 dari 76 atau 40,78% pengusaha UMKM yang telah menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan yang menyatakan mengalami peningkatan hutang dari waktu ke waktu. Selanjutnya tabel 5.11 menunjukkan bahwa sebanyak 65 atau 85,52% pengusaha yang berhutang menyatakan bahwa usaha mengalami peningkatan, terlepas hanya sedikit, sedang atau banyak. Namun belum diketemukana pola hubungan yang positif antara besaran perkembangan hutang dengan tingkat perkembangan usaha.

Tabel 5.11 Perkembangan Hutang dan Perkembangan Usaha

Perkembangan Hutang	Tinggi		Perkembangan Usaha						Total		
		%	Sedang	%	Sedikit	%	Menurun	%	Tetap	%	
Banyak	3	23.08	3	7.69	0	0%	0	0	0	0	6
Sedang	3	23.08	11	28.21	2	15.38	0	0	1	20	17
Sedikit	0	0	4	10.26	2	15.38	2	33.33	0	0	8
Menurun	3	23	10	25.64	4	30.77	2	33.33	2	40	21
Tetap	4	30.77	11	28.21	5	38.46	2	33.33	2	40	24
Total	13	100	39	100	13	100	6	100	5	100	76

Sumber : Data Primer, 2015

Terlepas belum adanya keterkaitan perkembangan besaran hutang dengan perkembangan usaha, ternyata para pengusaha UMKM di Salatiga berpandangan bahwa kedepan bahwa usahanya membutuhkan tambahan dana yang berasal dari hutang untuk kepentingan pengembangan usaha. Hanya 27,63% dari yang sudah berhutang dan 32,35% yang belum berhutang menyatakan tidak membutuhkan hutang.

**Tabel 5.12 Kebutuhan Hutang Dimasa Datang**

Kebutuhan Pendanaan Hutang Masa Depan	Yang sudah berhutang		Yang belum berhutang	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Banyak	16	21.05	28	20.59
Sedang	34	44.74	47	34.56
Sedikit	5	6.58	17	12.50
Tidak	21	27.63	44	32.35
Total	76	100	136	100

Sumber : Data Primer, 2015

Laporan akuntansi bukan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengambilan keputusan dan penilaian terhadap kemajuan usaha, tetapi merupakan syarat pengajuan kredit perbankan. Tabel 5.13 memperlihatkan bahwa hanya 31,3% pengusaha yang sudah mempunyai laporan akuntansi, meskipun masih sebatas pencatatan pemasukan dan pengeluaran (90,91%) dan bersifat manual (93,94%).

**Tabel 5.13 Pembuatan Laporan Akuntansi Industri Inti**

No.	Indikator	Jumlah	%
Panel A. Pembuatan Laporan Akuntansi			
1	Belum	146	68.87
2	Sudah	66	31.13
Total		212	100
Panel B. Bentuk Laporan Akuntansi			
1	Catatan Pemasukan / Pengeluaran	60	90.91
2	Laporan Keuangan (Neraca, Laba - Rugi)	6	9.09
Total		66	100
Panel C. Teknis Pembuatan Laporan Akuntansi			
1	Manual	62	93.94
2	Komputerisasi (Software Tertentu)	4	6.06
Total		66	100

Sumber : Data Primer, 2015

Meskipun laporan akuntansi itu penting, namun masih banyak pengusaha UMKM yang belum mengerjakannya dengan berbagai alasan. Tabel 5.14 menunjukkan bahwa sebagian besar (50%) tidak membuat laporan akuntansi adalah pengusaha malas/ tidak sempat/merepotkan dan merasa tidak membutuhkannya (24%).

**Tabel 5.14 Alasan Pembuatan Laporan Akuntansi**

No.	Alasan	Jumlah	%
1	Malas / Tidak Sempat / Merepotkan	60	50.00
2	Tidak Membutuhkan	29	24.17
3	Kesulitan membuat laporan keuangan	10	8.33
4	Omset dan Pengeluaran Sedikit	10	8.33
5	Hanya Dimanajemen Keluarga	6	5.00
6	Karena Tidak Diwajibkan Membuat	3	2.50
7	Keterbatasan Tenaga Kerja (Akuntan/Administrasi)	1	0.83
8	Skala usaha masih kecil	1	0.83
		120	100.00

Sumber : Data Primer, 2015